



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MUHAMMAD HATTA
NIK : 6271030202590004
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
Sub Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
Jabatan : KEPALA DINAS
Jenis Laporan : Periodik - 2017
Tanggal Kirim : 16 Maret 2018

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

Lengkap
 Tidak Lengkap



**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISNANIAH
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 419723

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	120.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	
120.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	21.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	91.157.049
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	232.157.049
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	232.157.049

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Agustus 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERI HIDAYAT
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 417838

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 280.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m²/41 m² di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000

1. MOBIL, SUZUKI X-OVER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 81.890.637

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 474.890.637

III. HUTANG Rp. 245.031.608

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 229.859.029

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **7 Agustus 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 April 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
SUB UNIT KERJA : BIDANG PERTANAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARIA CAHAYA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 423284

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	25.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	300.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	25.300.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 25.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Agustus 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 April 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIWID IRAWATI**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM**
3. NHK : **432633**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	160.000.000
1. Tanah Seluas 748 m2 di KAPUAS, WARISAN Rp. 10.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/54 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , WARISAN Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	155.000.000
1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	7.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	323.200.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	323.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 September 2018**.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.